

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET PUBLIK PADA BARANG  
MILIK NEGARA KATEGORI BARANG BERGERAK  
DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Administrasi Publik**



**Oleh:**

**TALITHA SAFA**

**07011182025001**

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JANUARI 2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET PUBLIK PADA BARANG  
MILIK NEGARA KATEGORI BARANG BERGERAK  
DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian  
Persyaratan Dalam Menempuh Derajat  
Sarjana S-1 Administrasi Publik**

**Oleh :**

**TALITHA SAFA**

**NIM. 07011182025001**

**Pembimbing Skripsi**

**Tanda Tangan**

**Tanggal**

**Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002**



**09 Januari 2024**



**HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENGELOLAAN ASET PUBLIK PADA BARANG  
MILIK NEGARA KATEGORI BARANG BERGERAK  
DI BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Oleh :

**TALITHA SAFA  
NIM. 07011182025001**

Telah dipertahankan di depan tim penguji  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Pada tanggal 25 Januari 2024

Pembimbing :

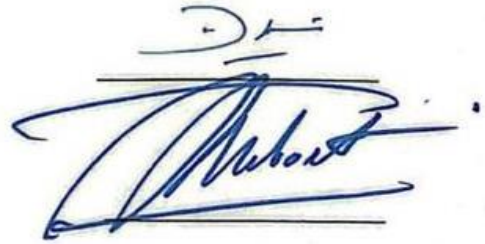
**Dwi Mirani, S.IP., M.Si  
NIP. 198106082008122002**

Penguji :

**1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**

**2. Drs. Mardianto, M.Si  
NIP. 196211251989121001**

Tanda Tangan



Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,

**Prof. Dr. Alfitri, M.Si  
NIP. 196601221990031004**



Ketua Jurusan  
Administrasi Publik,

**Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA  
NIP. 196911101994011001**



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Talitha Safa

NIM : 07011182025001

Jurusan : Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Publik Pada Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak Di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 15 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



**Talitha Safa**

**NIM. 07011182025001**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada proses yang mudah, untuk hasil yang indah”

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

“Ya Allah, anugerahkanlah kami Rahmat dari sisi-Mu dan sempurnakanlah kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami”

-(QS. Al-Kahfi :10)-

“Belajarlah mengucap syukur dari hal-hal baik di hidupmu, belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu.”

- B.J. Habibie -

**Skripsi ini saya persembahkan kepada :**

1. Kepada Kedua orang tua saya, mama dan baba
2. Saudara Perempuan saya, Intifadhah, Nailul Author, dan Qonita.
3. Kepada keluarga besar
4. Teman-teman seperjuangan
5. Kepada seluruh dosen dan pegawai FISIP UNSRI
6. Almamater kebanggaan

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa kendala dalam pengelolaan barang milik negara kategori barang bergerak yakni minimnya kesadaran sumber daya manusia akan pentingnya penataletakkan barang milik negara, adanya kendala dalam mengikuti pelatihan via zoom dan rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang yang dipinjam, serta tenaga kerja yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek pengelolaan barang milik negara kategori barang bergerak yang terdapat di BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan ini dapat melihat fenomena yang ada di lapangan secara alami, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori menurut Mardiasmo yang menekankan prinsip pengelolaan barang milik negara yaitu perencanaan yang tepat, pelaksanaan, serta pengewasan dan pengendalian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengelolaan aset publik pada barang milik negara kategori barang bergerak di BPMP Provinsi Sumatera Selatan, sudah berjalan cukup optimal. Penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengelolaan barang milik negara dengan merekrut sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan spesialisasi, meningkatkan edukasi dan komunikasi para pengguna barang milik negara, memberikan insentif atau penghargaan kepada pegawai, serta melakukan pelatihan dan sosialisasi yang interaktif dan sesuai durasi.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Barang Milik Negara, Barang Bergerak**

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by several obstacles in the management of state property in the category of movable goods, namely the lack of awareness of human resources of the importance of storing state property, obstacles in participating in training via zoom and a high sense of ownership of borrowed goods, and limited manpower. Therefore, the need for this research aims to analyze and focus attention on aspects of the management of state property in the category of movable goods contained in the BPMP of South Sumatra Province. This research uses a qualitative approach that is descriptive in nature. This approach can see phenomena that exist in the field naturally, in-depth interviews, and documentation. The theory used in this research is Mardiasmo's theory which emphasizes the principles of managing state property, namely proper planning, implementation, and supervision and control. Based on the results of the research that has been conducted, it shows that the management of public assets in the category of movable state property in the BPMP of South Sumatra Province has been running quite optimally. This research is expected to optimize the management of state property by recruiting human resources who have expertise and specialization, increasing education and communication of state property users, providing incentives or awards to employees, and conducting interactive and appropriate training and socialization duration.*

**Keywords: Management, State Property, Movable Goods**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyusun Skripsi yang berjudul “Analisis Pengelolaan Aset Publik Pada Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan”. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, serta mendoakan penulis di setiap proses perjalanan yang penulis tempuh sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Dengan itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan kepada :

1. Allah SWT dan junjungannya Nabi Muhammad SAW, berkat izin dan kehendak-Nya serta petunjuknya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Kedua orang tua, Baba (Drs. H. A. Gani Subit. M.M) dan Mama (Dra. Hj. Sulasiyah) yang telah memberikan semangat dan doa yang tak pernah putus diberikan untuk penulis selama ini. Terimakasih atas nasihat dan perhatian yang selalu diberikan meski terkadang pemikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati yang sangat luar biasa dalam menghadapi penulis, dan tidak hentinya berterima kasih telah menjadi penguat dan pengingat paling hebat demi kelancaran segala urusan dan kesuksesan penulis di masa depan.
3. Kepada Ketiga Saudara Perempuan (Intifadhah, Nailul Author, dan Qonita), Kakak Iparku (Edi Hariyanto dan Okta Ariska), serta Keponakanku yang sholeh dan cerdas (Emyr Salim Hamizan) yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan semangat serta menjadi pendengar yang baik dan selalu dapat menghibur penulis.
4. Rektor Universitas Sriwijaya Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE.
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
6. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.
7. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku pembimbing akademik.
8. Ibu Dwi Mirani, S.IP., M.Si selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan kesempatan dan membimbing penulis untuk selalu belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu baru yang dapat menjadi bekal penulis kedepannya.
9. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu, memberi masukan, dan mengajarkan setiap ilmu yang diberikan selama dibangku perkuliahan.



10. Seluruh staf dan karyawan FISIP UNSRI yang telah membantu dalam setiap proses pemberkasan, surat-menyurat, menyediakan ruangan selama perkuliahan dan penyusunan skripsi berlangsung.
11. Admin Jurusan Administrasi Publik, Mba Ita yang selalu memberikan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
12. Bapak Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si, sebagai Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan.
13. Bapak Muhammad Ali Fainaludin, S.Ag., M.M selaku Kepala Sub Bagian Umum BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
14. Bapak Riduan, Pak Karwan, Pak Yonis, Ibu Yayuk, dan Pak Salahudin yang memberikan penulis bekal pengetahuan mengenai pengelolaan barang milik negara kategori barang bergerak di BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
15. Seluruh Staf dan Pegawai di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Sumatera Selatan.
16. Teman-teman seperjuangan Administrasi Publik Chika Aprilia, Vera Anggi Yulianti.P, Suci Ananda, Rizka Rahmawati, Satria Wahyuda, dan Adam yang telah membantu, menemani, dan memberi dukungan kepada penulis selama proses perkuliahan ini.
17. Teman satu angkatan Administrasi Publik 2020 terimakasih atas kebersamaan dan pengalamannya.

Demikian Laporan Skripsi ini dibuat, penulis haturkan terimakasih yang amat mendalam kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan Skripsi. Semua kritik yang membangun akan diterima oleh penulis terhadap laporan ini guna untuk membuat laporan dan analisis ini menjadi lebih baik lagi. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam segi penyusunan maupun penulisannya. Namun, Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis, para mahasiswa, akademisi, serta Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Indralaya, 15 Januari 2024



Talitha Safa  
NIM.07011182025001

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>13</b>
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Manajemen.....	13
2.1.2 Manajemen Sektor Publik.....	14
2.1.3 Teori Pengelolaan (Manajemen).....	17
2.1.4 Barang Milik Negara.....	23
2.1.5 Aset Tetap.....	30
2.1.6 Barang Bergerak.....	32
2.2 Teori Yang Digunakan.....	34
2.3 Penelitian Terdahulu.....	36
2.4 Kerangka Pemikiran.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2 Definisi Konsep.....	43

3.3	Fokus Penelitian.....	43
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	45
3.5	Informan Penelitian ( <i>Key Informan</i> ).....	46
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.7	Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>51</b>
4.1	Gambaran Umum.....	51
4.1.1	Sejarah BPMP Provinsi Sumatera Selatan.....	51
4.1.2	Letak Geografis BPMP Provinsi Sumatera Selatan.....	53
4.1.3	Visi dan Misi BPMP Provinsi Sumatera Selatan.....	54
4.1.4	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPMP.....	55
4.2	Deskripsi Informan Penelitian.....	58
4.3	Hasil Penelitian.....	61
4.4	Pembahasan.....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
5.1	Kesimpulan.....	105
5.2	Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		<b>111</b>

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Daftar Nilai Aset Pemerintah Indonesia Periode 2022.....	3
Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Pegawai Tahun 2023 .....	4
Tabel 3. Data Kategori Usia Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 .....	5
Tabel 4. Daftar Pengelola Barang Milik Negara BPMP Provinsi .....	7
Tabel 5. Data Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak.....	8
Tabel 6. Diferensiasi OPA, NPM, dan NPS.....	15
Tabel 7. Penelitian Terdahulu .....	36
Tabel 8. Fokus Penelitian.....	44
Tabel 9. Daftar kebutuhan aset/barang bergerak Periode 2022-2023 .....	66
Tabel 10. Data Inventarisasi Ruangan Aula Cendrawasih.....	79
Tabel 11. Matriks Temuan Penelitian .....	102

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Nilai Aset Tetap Dari Tahun Sebelumnya.....	3
Gambar 2. Kerangka Pemikiran .....	41
Gambar 3. Logo BPMP Provinsi Sumatera Selatan .....	51
Gambar 4. Lokasi BPMP Provinsi Sumatera Selatan.....	54
Gambar 5. Struktur Organisasi .....	58
Gambar 6. POS Pengusulan Rencana Kebutuhan .....	63
Gambar 7. POS Pengadaan Barang dan Jasa.....	68
Gambar 8. POS Pengelolaan Barang Milik Negara .....	72
Gambar 9. SK Pensiun Pegawai BMN .....	75
Gambar 10. Dokumen Peminjaman Barang Berupa Laptop .....	77
Gambar 11. Surat Pendataan Barang Milik Negara.....	78
Gambar 12. Dokumen Berita Acara Serah Terima .....	80
Gambar 13. Dokumentasi Rapat Tim Pengelola BMN .....	82
Gambar 14. Barcode dan link Inventaris Ruang Aula Cendrawasih .....	82
Gambar 15. POS Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara .....	86
Gambar 16. Kondisi Pengembalian Aset/Barang Rusak .....	90
Gambar 17. Dokumentasi Rapat Evaluasi Tim Pengelola BMN .....	91
Gambar 18. Kegiatan Pelatihan Pengembangan.....	92
Gambar 19. Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CALBMN).....	94
Gambar 20. Kunjungan BMN Kemendikbud dalam Mengontrol Aset.....	96
Gambar 21. Penilaian Nilai Barang dari Kantor.....	97

## DAFTAR SINGKATAN

BMN	: Barang Milik Negara
BPMP	: Balai Penjaminan Mutu Pendidikan
RKBMN	: Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara
POS-AP	: Prosedur Operasional Standar Administrasi Pemerintahan
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
DAT	: Daftar Aset Tetap
ASN	: Aparatur Sipil Negara
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
KPPN	: Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
CALBMN	: Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu, sistem pengelolaan aset publik di Indonesia terus berkembang, didorong dengan adanya perubahan kondisi ekonomi, kebijakan, serta teknologi yang semakin canggih, sehingga mampu mencerminkan dan mengadopsi perubahan dalam sistem serta mekanisme kerja yang lebih sesuai dengan tuntutan era saat ini, agar tidak mengalami ketertinggalan dan kemunduran dalam menghadapi transformasi globalisasi yang terus berlangsung.

Peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di tengah kompleksitas tuntutan zaman dalam proses pengelolaan aset publik pada barang milik negara. Hal ini penting bagi kita untuk tidak hanya memantau perkembangan, tetapi juga menjadi pelaku yang aktif, dengan adanya ketersediaan untuk melakukan perubahan dalam sistem dan alur kerja yang dapat menjadi faktor utama dalam pengelolaan aset negara.

Berdasarkan laman DJKN Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa, rencana proses pengelolaan aset negara harus didorong dengan adanya pendekatan yang lebih adaptif, responsif, dan modern sesuai perkembangan zaman, agar tetap relevan dan efektif dalam konteks globalisasi yang terus berubah. Dalam hal ini, perkembangan globalisasi pengelolaan aset publik pada barang milik negara bukan hanya sebagai respons terhadap tuntutan global tetapi sebagai langkah proaktif menjadi pionir untuk menciptakan *good governance* yang efektif dan efisien (Pardiman & Ulin Nuha, 2009:1)

Komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan aset publik yang berkualitas tentunya tidak luput dari setiap proses manajemen yang harus memiliki perencanaan yang mapan, pelaksanaan yang efektif, serta pemantauan dan regulasi, agar dapat mendorong inovasi untuk mengembangkan ide-ide baru dan teknologi yang mampu membantu meningkatkan tata kelola aset negara. Pengelolaan aset negara terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020, yang telah di modifikasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Tepatnya pada Pasal 1 Ayat 1 dari peraturan tersebut mengatakan bahwa Aset Negara merupakan keseluruhan barang yang diperoleh melalui penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja negara atau didapatkan dari sumber perolehan lainnya yang sah.

Aset publik diartikan sebagai sumber daya ekonomi yang dikendalikan atau dimiliki oleh pemerintah, dan merupakan faktor penting pada penggunaan kebijakan pemerintah untuk memberikan bantuan kepada publik, agar pengelolaan aset negara dapat dilakukan dengan kondusif dan efektif. Sehubungan dengan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Periode 2022, jumlah barang yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebesar Rp.6.660 triliun rupiah yang telah diklasifikasikan dalam tiga pembagian aset yakni aset lancar berjumlah senilai Rp.204,8 triliun rupiah, aset tetap senilai Rp.5.956,5 triliun rupiah, serta aset tak berwujud lainnya yang berjumlah Rp.498,3 triliun rupiah. Adapun rincian Tabel pada penjelasan diatas yaitu :



**Tabel 1. Daftar Nilai Aset Pemerintah Indonesia Periode 2022**

No	Objek Aset Negara	Nilai Aset
1.	Aset Lancar	Rp. 204,8 triliun
2.	Aset Tetap	Rp. 5.956,5 triliun
3.	Aset Lainnya	Rp. 498,3 triliun

*Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), 2022*

Pemerintah berkewajiban untuk menyongsong fasilitas dan kebutuhan institusi pemerintah dan pegawai publik atau ASN hingga dapat memberikan pelayanan yang berkualitas. Dalam hal ini, pengelolaan aset publik pada barang milik negara khususnya pada aset tetap, dalam prosesnya harus mampu berjalan dengan efektif. Sehubungan dengan data LKPP periode 2021 yang telah diaudit, jumlah aset negara kategori aset tetap senilai 11.545 Triliun Rupiah (LKPP, 2022). Hal tersebut dapat ditinjau melalui gambar 1 berikut ini yang memperlihatkan kategori aset tetap mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.

**Gambar 1. Nilai Aset Tetap Dari Tahun Sebelumnya**

*Sumber : LKPP, 2021*

Nilai aset tetap pada barang milik negara yang besar perlu melakukan pengelolaan secara optimal dan akuntabel berdasarkan ketentuan hukum aset yang harus memberikan fasilitas pelayanan yang optimal bagi kemakmuran rakyat.

Dalam konteks pengelolaan barang milik negara, sistem pengelolaan yang baik dapat mendorong praktik-praktik yang transparan, akuntabel, dan efisien dalam menunjang *public service* yang berkualitas terutama pada BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

Di dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan adalah satuan kerja yang berperan dalam menjamin kualitas mutu di suatu lembaga pendidikan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses pembelajaran, kurikulum, fasilitas, dan sumber daya pendidikan lainnya. Didorong dengan adanya sumber daya manusia yang dimiliki institusi, dimana BPMP Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 81 pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan dan kategori usia yang dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan harmonis. Tabel di bawah ini menunjukkan data pendidikan pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023**

Pendidikan						
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3
		15	2	30	31	3

*Sumber : Berdasarkan Data bidang tatalaksana dan kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, 2023*

Pada Tabel 2 diatas, dijelaskan bahwa tingkat pendidikan 81 pegawai yang bekerja di BPMP Provinsi Sumatera Selatan memiliki strata yang berbeda, dimana terdapat 15 pegawai lulusan SMA, 2 pegawai bergelar D3, 30 pegawai yang memiliki gelar S1, dan terdapat 32 pegawai lulusan S2, serta pegawai yang memiliki gelar S3 berjumlah 3 orang. Jika dilihat pada tabel di bawah ini, terdapat pula data kategori usia pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut.

**Tabel 3. Data Kategori Usia Pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023**

Kategori Usia					
25-30	31-35	36-40	41-45	46-50	>50
		5	20	20	36

*Sumber : Berdasarkan Data bidang tatalaksana dan kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, 2023*

Dilihat pada Tabel 3 diatas, bahwa rata-rata usia pegawai BPMP Provinsi Sumatera Selatan berusia 50 tahun keatas, yang mana sangat rentan dalam mengikuti perkembangan teknologi serta beberapa tahun kedepan terdapat pegawai yang purna bakti, hal ini sangat berpengaruh pada kualitas SDM di BPMP Provinsi Sumatera Selatan. Dalam hal ini, BPMP Provinsi Sumatera Selatan harus memastikan kualitas SDM dan komitmen pegawai yang menjadi salah satu bentuk investasi yang baik untuk mengasah kesiapan dalam menyikapi segala kondisi yang muncul dimasa depan.

Penelitian ini memilih lokus di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, dikarenakan terdapat bidang pengelolaan barang milik negara yang memiliki peran sangat penting sebagai ujung tombak bagi terselenggaranya setiap aktivitas kerja dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan aset secara transparan, efisien, dan sesuai aturan hukum yang berlaku, serta mampu menunjang fasilitas institusi.

Pengelolaan aset publik pada barang milik negara merupakan peran vital dalam mendukung kesejahteraan institusi dan program pemerintah. Meskipun pengelolaan barang milik negara sangat penting, namun pada pelaksanaannya sendiri seringkali muncul berbagai masalah dan kebiasaan buruk yang ditemukan, dimana minimnya kesadaran sumber daya manusia akan pentingnya penataletakkan barang milik negara, hal ini dilihat dari penataletakkan barang

yang sering berpindah-pindah tempat tanpa seizin pengelola aset, diketahui ketika pegawai berpindah ruangan atau pindah pada bidang tertentu terdapat beberapa pegawai yang seringkali juga memindahkan aset yang difasilitasi pada ruang kerja sebelumnya, sehingga kebiasaan buruk ini mengakibatkan barang yang telah terdata pada inventaris tidak sesuai dengan penempatan barang yang dilihat dilapangan secara langsung bahkan parahnya terdapat beberapa barang yang hilang, hal inilah yang dapat mempersulit pengelola dalam memantau aset yang dimiliki institusi.

Selain itu, adanya rasa kepemilikan yang tinggi terhadap barang yang dipinjam, yakni terdapat beberapa pegawai yang sangat sulit untuk mengembalikan barang dikarenakan beberapa faktor, diantaranya barang tidak dikembalikan sesuai waktu pengembalian, barang tidak dikembalikan dikarenakan kondisi telah rusak namun seharusnya tetap dikembalikan, hal inilah yang memperlambat proses pengembalian barang sehingga pengelola aset harus mengingatkan bahkan menagih pengguna untuk mengembalikan aset yang dipinjam atau difasilitasi sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Serta adanya keterbatasan tenaga kerja di bidang BMN atau perlengkapan dikarenakan terdapat pegawai yang telah pensiun sehingga menyebabkan SDM pada bidang barang milik negara berkurang dan belum terdapat pengganti atau pegawai yang direkrut, kurangnya pengelola BMN dapat menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan proses pengawasan dan tata kelola aset tidak terkendali dengan baik, hal ini dapat mengganggu efisiensi dan sistem pelayanan yang baik dalam proses pengelolaan BMN. Dalam upaya menjaga setiap proses pengelolaan aset negara di BPMP Provinsi Sumatera Selatan, tentunya melibatkan berbagai pihak yang bertanggung

jawab dalam rangkaian kegiatan pengelolaan barang. Berikut daftar tabel pengelola barang milik negara di BPMP Provinsi Sumatera Selatan.




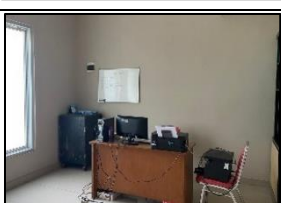
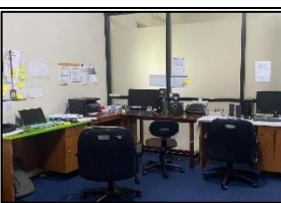


**Tabel 4. Daftar Pengelola Barang Milik Negara BPMP Provinsi Sumatera Selatan**









<b>No</b>	<b>Nama Pengelola</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Aria Ahmad Mangunwibawa, S.Psi., M.Si	Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan.
2.	M. Ali Fainaludin, S.Ag., M.M	Kepala Sub Bagian Umum
3.	Yayuk Rahmawati, S.T., M.Si	Pejabat Pembuat Komitmen
4.	Ahmad Riduan, S.E., M.Acc	Pejabat Pengadaan Barang Milik Negara
5.	Karwan Sugiarto, S.AP., M.Si.	Pengelola BMN
6.	Des Erman Triansah	Pengadministrasi Barang Milik Negara
7.	Lubis Arminton, S.H	Pengadministrasi Barang Milik Negara
8.	Samsuri, A.Md	Bendahara
9.	Samak, A.Md., S.Pd.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
10.	Maryati Ningsi, A.Md	Pengelola Keuangan
11.	Salahuddin Al Arief	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana.

*Sumber : Berdasarkan Data bidang tatalaksana dan kepegawaian BPMP Provinsi Sumatera Selatan, 2023.*

Dilihat dari data Tabel 4 diatas, bahwa dalam mendukung pengelolaan aset yang efektif dan efisien harus didorong dengan adanya keterlibatan dan keaktifan setiap pengelola, agar mampu mewujudkan pengelolaan aset yang berkualitas dan mencapai tujuan pemerintah dalam pelayanan publik yang baik. Berikut disajikan dalam bentuk tabel mengenai daftar Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak di BPMP Provinsi Sumatera Selatan.

**Tabel 5. Data Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak di BPMP Provinsi Sumatera Selatan**

No	Nama Barang	Kondisi	Dokumentasi	Total	Satuan
1.	Kursi Kerja	Baik		1159	Buah
2.	Meja	Baik		338	Buah
3.	Lemari	Baik		81	Buah
4.	Printer	Baik		33	Unit
5.	Laptop	Baik		30	Unit
6.	PC/Komputer	Baik		41	Unit
7.	Proyektor	Baik		9	Unit

8.	Nakas	Baik		31	Buah
9.	Lemari Rak	Baik		141	Buah
10.	Dispenser dan Kulkas	Baik		14	Buah
11.	Standing AC dan Kipas	Baik		137	Unit
12.	Sofa	Baik		65	Set
13.	Televisi	Baik		23	Unit
14.	Kendaraan Mobil	Baik		7	Unit
15.	Kendaraan Bermotor	Baik		2	Unit

*Sumber : Data Inventarisasi BMN Kategori Barang Bergerak BPMP  
Provinsi Sumatera Selatan, 2023*

Tabel 5 diatas, memuat daftar barang milik negara kategori barang bergerak dengan melampirkan kondisi dan jumlah keseluruhan barang pada periode tahun 2023. Dari konteks yang telah dijelaskan diatas, peneliti berkomitmen untuk menganalisa lebih mendalam mengenai pengelolaan aset publik pada barang milik negara (BMN), khususnya dalam kategori barang bergerak.

Penelitian ini akan memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang mempengaruhi proses pengelolaan aset negara yang dikategorikan pada barang bergerak, yang berpedoman pada teori menurut pendapat Mardiasmo dalam (Puspitoarum, 2006:232) dimana hal ini dilakukan dengan mempraktekkan tiga prinsip pengelolaan barang milik negara yaitu Perencanaan (*planning*), Pelaksanaan atau Tindakan (*actuating*), serta Pengawasan dan Pengendalian (*controlling*). Hal ini dapat membedakannya dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada isu keseluruhan tentang barang milik negara dengan mengangkat teori, metode, dan permasalahan yang berbeda.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azuwandri & Muhammad Bima Eka Putra (2022) dengan menggunakan analisis perbandingan yang terkendala pada kegiatan inventarisasi yang tidak terlaksana, serta lemahnya pengetahuan SDM dalam pengelolaan aset. Penelitian Sukmini Hartati dkk (2019) yang menggunakan analisis data regresi berganda dengan hasil pengendalian dan pemantauan aset memiliki pengaruh positif dan juga menandakan optimasi aset tetap dikelola dengan baik. Serta penelitian oleh Nurbiyanto (2020) dengan metode kualitatif menggunakan studi literatur sebagai jawaban dari permasalahan penilai dalam perdagangan aset. Dapat dilihat, bahwa dalam setiap penelitian mengenai pengelolaan aset memiliki perbedaan baik dalam pendekatan



metodologi, fokus variabel, dan konteks aplikasi, sehingga menghasilkan temuan-temuan yang berbeda dalam lingkup pengelolaan aset.

Maka, berdasarkan data dan penjabaran diatas, peneliti bersedia dan berkomitmen untuk mengkaji serta melaksanakan proses penelitian yang berfokus pada judul “Analisis Pengelolaan Aset Publik Pada Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemikiran diatas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Pengelolaan Aset Publik Pada Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak Di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis proses Pengelolaan Aset Publik Pada Barang Milik Negara Kategori Barang Bergerak di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari temuan penelitian :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini nantinya dapat menambah ilmu dan pemikiran baru serta informasi yang penting bagi jurusan Administrasi Publik khususnya

mengenai pengelolaan aset publik pada barang milik negara kategori barang bergerak.

## 2. Manfaat Praktis

Temuan Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan masukan pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan serta bidang barang milik negara sebagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andhita, M., & Sucahyo, U. S. (2020). Akuntabilitas Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Aset Tetap Kota Salatiga. *International Journal of Social Science and Business*, 4(2), 308. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v4i2.24243>
- Aprilia, I., Syaukat, Y., & Falatehan, A. F. (2019). Optimisasi Manajemen Aset Tetap Daerah Dalam Mewujudkan Good Governance Di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(2), 1–17. [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v10i2.27783](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v10i2.27783)
- Bima, M., & Putra, E. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. *Administrasi Bisnis Nusantara*, 1(2), 81–94.
- Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. (2023).
- Fayol, H. (2010). *Manajemen Public Relations*. PT. Elex Media.
- Handoko, T. H. (2009). *Manajemen*. BPFE-Yogyakarta.
- Hasan, W. A. (2019). Sistem Pengelolaan Aset Tetap Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.35326/jiam.v2i1.252>
- Hasibuan, M. S. (1996). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. PT. Toko Gunung Agung.
- Keban, Y. T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Gava Media.
- Keputusan Presiden. (2003). *Keppres No. 80 tahun 2003 (Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)*.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. (2022). *LKPP* (pp. 166–170).
- Maharani, D., & Rosilawati. (2018). Pengaruh Pengawasan Dan Pengendalian Terhadap Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Serang Kota Serang. 1(44), 51–58.
- Mawikere, L. (2015). Evaluasi sistem pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada bpk-bmd kota bitung. *Jurnal EMBA*, 3(4), 13–22.
- Moleong, L. . (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Nadialista Kurniawan, R. A. (2021). Pertanggungjawaban Hukum BAPPEDA Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good

Governance. *Industry and Higher Education*, 3(1), 1689–1699.  
<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uac.ac.id/handle/123456789/1288>

- Nanang, F. (2006). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.
- Nurbiyanto. (2020). Peran penilai pemerintah dalam rangka pengelolaan barang milik negara berupa aset tetap. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(2), 103.
- Nurlaela, E., & Andriani, L. (2018). Paradigma *New Public Service*. *Institut STIAM Administrasi Perpajakan*, 1–25.
- Oktabela, M. E. (2018). Tinjauan Pelaksanaan dan Fungsi Pelaksanaan. *Graha Ilmu*, 1–42.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=Oktabela%2C+M.+E.+%282019%29.+Pelaksanaan+Pembangunan+Kawasan+Industri+Di+Piyungan+Kabupaten+Bantul+Berdasarkan+Peraturan+Daerah+Bantul+Nomor+4+Tahun+2011+%28Doctoral+dissertation%2C+UAJY%29.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Oktabela%2C+M.+E.+%282019%29.+Pelaksanaan+Pembangunan+Kawasan+Industri+Di+Piyungan+Kabupaten+Bantul+Berdasarkan+Peraturan+Daerah+Bantul+Nomor+4+Tahun+2011+%28Doctoral+dissertation%2C+UAJY%29.&btnG=)
- Pardiman & Ulin Nuha. (n.d.). Penataan Pengelolaan Barang Milik Negara. 2009.  
<https://doi.org/https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/>.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2012). Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur. In *Permenpan Nomor 21 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan* (Vol. 6, Issue 11, pp. 1–63).
- Peraturan Pemerintah. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Peraturan Pemerintah. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara*.
- Prosedur Operasional Standar Pengadaan Barang dan Jasa. (2023).
- Prosedur Operasional Standar Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara. (2023).
- Prosedur Operasional Standar Pengusulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara. (2023).
- Prosedur Pengelolaan Barang Milik Negara. (2023).
- Puspitoarum, M. A. (2006). Analisis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar. *Jurnal Administrative Reform*, 229–241.
- Rahmatiah Dwi Rizky. (2008). Analisis Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan

- Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya Pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango Analysis. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(55), 743–752.
- Rocmansjah, C. S. dan H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Fokus Media.
- Sahid, D. R., & Rachlan, E. R. (2019). Pengelolaan Fasilitas Pembelajaran Guru dalam meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Jasmani di Sekolah Menengah kejuruan (SMK). *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 3(1), 25–39. <http://dx.doi.org/10.4321/ijemar.v3i1.2945>
- Schermerhorn, J. . (2011). *Managemenet*. Jhon Wiley and Sons Inc.
- Setiabudhi, D. O. (2019). Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Good Governance. *The Studies of Social Sciences*, 1(1), 7. <https://doi.org/10.35801/tsss.2019.1.1.25014>
- Shaleh, K., Sukmawati, F. (2023). *Peningkatan Kapasitas Bimbingan Teknis Pengelola Aset Desa Melalui Pendampingan Capacity Building for Village Asset Management Through Technical Guidance Assistance*. 6(1), 140–142.
- Sigit Pudjianto, W. (2019). *Pendekatan Baru Perencanaan Pembangunan Daerah*. Buku Kompas.
- Sondakh, B. Y., Sabijono, H., & Mawikere, L. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Selatan). *Journal EMBA*, 5(2), 1171–1181.
- Stoner, J. A. . (1996). *Manajemen, Edisi Indonesia*. PT. Prenhallindo.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT. Bumi Aksara.
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*.
- Terry, G.R & Rue, L. . (2020). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara.
- Wiyatika, A. (2021). Koordinasi dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Studi paada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7(2), 261–272.
- Yanto, E. S. (2022). Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palangka Raya Management of Regional Property in the Financial Management Agency and Regional Assets in the City of Palangka Raya Abstrak. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, 8(April).

Yuniarto, A. (2020). Melihat Perlunya Pemerintah Melakukan Program Revaluasi Aset Barang Milik Negara. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 1–8. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.784>